

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SRANDAKAN

THE STRATEGY FOR IMPLEMENTING THE POLICY OF IMPROVING QUALITY IN THE STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 1 SRANDAKAN

Plendes Suluh Budiarta
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, FIP, Universitas Negeri Yogyakarta
plendessuluhb@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Implementasi Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu, (2) kendala implementasi kebijakan peningkatan mutu, serta (3) solusi untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles and Hubberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan telah berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu standar dan tujuan kebijakan yang telah tercapai, sumber daya ada yang mendukung, komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, karyawan, dan siswa berjalan dengan lancar, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan berjalan dengan baik, karakteristik agen pelaksana yang mendukung, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif dan mendukung strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu. (2) Kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu yaitu: rendahnya pemahaman siswa terhadap pentingnya pendidikan, jumlah tenaga pendidik yang belum memadai, sarana prasarana pembelajaran belum memadai, dan keadaan ekonomi orang tua siswa tergolong dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah. (3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu yaitu: memberi pendekatan agar siswa ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, mencari guru pengganti sesuai mata pelajaran, pengadaan sarana prasarana melalui dana BOS, menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa tidak mampu.

Kata kunci: implementasi, kebijakan pendidikan, mutu pendidikan, SMP Negeri 1 Srandakan

Abstract

This study aims to describe (1) the strategy of implementing quality improvement policies, (2) constraints to implementing quality improvement policies, and (3) solutions to overcome the obstacles to implementing quality improvement policies in State Middle School 1 Srandakan. This type of research is descriptive using a descriptive qualitative approach. The research subjects were principals, vice principals, and teachers. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using Miles and Hubberman's interactive analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While the validity of the data is tested by triangulation

of techniques and sources. The results of the study show the following. (1) The strategy for implementing quality improvement policies in SMP Negeri 1 Srandakan has been in accordance with the objectives of its establishment. This can be seen from several indicators including the standards and policy objectives that have been achieved, existing resources that support, communication between principals with teachers, employees, and students running smoothly, interorganization and confirmation activities go well, the characteristics of implementing agents that support, as well as conducive social, economic and political conditions and support strategies for implementing quality improvement policies. (2) Constraints that arise in the implementation of quality improvement policies are: low student understanding of the importance of education, inadequate number of educators, inadequate learning infrastructure facilities, and economic conditions of parents of students belonging to the middle to lower economic level. (3) Solution to overcome the obstacles in implementing quality improvement policies, namely: giving an approach so that students want to continue their education to the next level, looking for substitute teachers according to subjects, procurement of infrastructure through BOS funds, providing Smart Indonesia Program (PIP) for disadvantaged students.

Keywords: implementation, education policy, quality of education, SMP Negeri 1 Srandakan

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam menghadapi kemajuan zaman. Pendidikan memiliki tujuan yang idealis sehingga diperlukan keseriusan dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan yang mampu menopang kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi yang sedang dan akan terjadi. Pendidikan sangat penting karena berkontribusi besar dalam mencapai kemajuan diberbagai kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dengan demikian, pendidikan merupakan sektor penting yang berpengaruh besar terhadap citra suatu bangsa.

Terdapat sekian banyak permasalahan mengenai pendidikan di Indonesia, salah satunya rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan sarana fasilitas pendidikan juga kurang memadai. Dalam kondisi apapun komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidaklah berubah. Berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan di

Indonesia. Untuk mencapai pendidik yang diharapkan maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemerintah memberikan hak kepada warga negara atau masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan generasi muda yang baik dan bermutu pula, hal ini akan berdampak pada pembangunan perbaikan sumber daya manusia yang baik. Dalam membangun suatu bangsa yang maju diperlukan sumber daya manusia yang baik, sehingga pendidikan sangat diperlukan. Dalam hal ini sekolah diharapkan dapat menghasilkan mutu lulusan yang baik dan unggul.

Penerapan desentralisasi kedalam manajemen pendidikan menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi bergantung pada kebijakan dan birokrasi sentralistik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berlakunya konsep desentralisasi, perlu dipahami strategi dan pengelolaan yang berasas kemandirian melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kebebasan kekuasaan sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat (stakeholder), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan

pendidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa ditingkatkan.

Pengelolaan pendidikan antar sekolah satu dengan sekolah yang lain dapat berbeda. Setiap sekolah mempunyai strategi dan kemampuan yang berbeda dalam meningkatkan mutu pendidikan, masing-masing disesuaikan dengan kondisi siswanya. Arcaro, (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011: 90-91) mengambil dari argumentasi para ahli, menyebutkan bahwa dasar misi peningkatan kualitas sebuah sekolah adalah mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas harus diawali dengan kesepakatan bersama dari para aktor di sekolah, dalam hal ini para guru, kepala sekolah, dewan sekolah, administratif, siswa, dan komunitas sekolah, untuk mendedikasikan dirinya dalam perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah.

Arif Rohman (2009: 109) dalam bukunya juga mengatakan bahwa suatu kebijakan yang diambil dan diputuskan biasanya didasari oleh adanya masalah yang ada dalam pendidikan. Masalah biasanya muncul ketika adanya kesenjangan antara dunia cita-cita (*das sollen*) dengan dunia nyata (*das sein*). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan (*descripancy*) atau mendekatkan antara dunia cita-cita (harapan) dengan dunia nyata (kenyataan) tersebut.

Suatu kebijakan akan menemui banyak masalah pada tahap pengimplementasiannya, karena itu alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan, harus dapat diimplementasikan. Masalah tersebut sering diartikan secara sederhana, padahal masalah oleh seseorang mungkin menguntungkan bagi orang lain. Sehubungan dengan sifat praktis dan terkandungnya tujuan dalam perumusan kebijakan, maka implementasi kebijakan berkenaan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi para pelaku (Yoyon Bahtiar Irianto, 2011: 41).

Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan tidak dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Kebijakan akan hanya tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman (2009: 134). Implementasi Kebijakan

dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan yang merupakan usaha untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru SMP N 1 Srandakan yang berhasil kami temui, dari wawancara tersebut kami dapatkan beberapa informasi mengenai sekolah ini. Menurut sumber yang kami temui SMP Negeri 1 Srandakan mempunyai beberapa kebijakan yang dibuat oleh sekolah, kebijakan ditujukan untuk memperbaiki kualitas mutu lulusan yang nanti juga berdampak pada kualitas mutu sekolah. Dengan adanya kebijakan tersebut, SMP Negeri 1 Srandakan juga dapat mempersiapkan siswa untuk lebih siap dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dimana setiap siswa memiliki perbedaan karakter dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu kebijakan tersebut adalah tambahan jam pelajaran (Tajam).

Tambahan jam pelajaran (Tajam) dilaksanakan dengan harapan agar siswa khususnya kelas IX akan semakin meningkat prestasi belajarnya, dan ditunjukkan oleh hasil Ujian Nasional yang semakin meningkat. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah yang bersangkutan, melainkan prestasi hasil belajar siswa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2010: 9-12).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Srandakan, yang berlokasi di Dusun Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul. Kemudian penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Februari 2018 sampai bulan April 2018.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 1 kepala sekolah dan 3 guru di SMP Negeri 1 Srandakan. Informan utama (*key informan*) dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bidang akademis di SMP N 1 Srandakan. Sedangkan subjek lainnya merupakan informan pendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2010:62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mencari data. Bila dilihat dari sumber datanya dapat berupa data primer dan sekunder, namun dilihat dari teknik pengumpulan datanya, maka data dapat diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 4 kriteria berikut: (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) ketergantungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*) Untuk menjaga keabsahan data maka digunakan teknik pengamatan lapangan dan triangulasi sumber dengan pertimbangan untuk memperoleh informasi yang akurat dari informan maka diperlukan crosscheck antara informan yang satu dengan informan yang lain (Lexy J. Moeloeng, 2007:324). Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik dan sumber.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif menurut Milles dan Hubberman (2014: 12) yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu di SMP Negeri 1 Srandakan

Strategi juga diimplementasikan dalam peningkatan kualitas mutu di SMP Negeri 1 Srandakan. Berikut diuraikan strategi yang diterapkan SMP Negeri 1 Srandakan dalam peningkatan kualitas mutu sekolah.

a. Standard dan Tujuan

Setiap kebijakan pasti mempunyai standard dan tujuan yang ingin dicapai pada implementasinya. Berdasarkan PP No 19 Tahun 2005, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu di sekolah SMP Negeri 1 Srandakan mempunyai standar dan tujuan dari kebijakan peningkatan mutu sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber dalam wawancara di atas yaitu karena disesuaikan dengan visi-misi kabupaten Bantul yakni CERDAS standarnya SMP Negeri 1 Srandakan sudah menetapkan nilai KKM yang sudah ditentukan diawal tahun pelajaran, siswa mengikuti sesuai jadwal, ada perkembangan nilai dari TPM 1, 2 dan seterusnya sampai hasil dari ujian nasional sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah dan diharapkan dapat memperbaiki posisi peringkat sekolah.

Sedangkan untuk tujuannya seiring visi-misi kabupaten Bantul yakni CERDAS maka visi-misi tersebut diimplementasikan di sekolah dimaksudkan agar dapat menjadi acuan bagi sekolah supaya bisa memaksimalkan dan meningkatkan prestasi sekolah, peningkatan nilai ujian nasional, peningkatan peringkat sekolah, dan meningkatkan output sekolah. Beberapa hal tersebut merupakan tujuan dari meningkatkan mutu sekolah.

b. Sumber Daya Sekolah

Mulyasa (2006:151) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Maka dari itu dari hasil wawancara kondisi Sumber daya manusia yaitu tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 srandakan yaitu kompetensi guru harus dilihat dari latar belakang guru. Guru di SMP Negeri 1 Srandakan sudah berkompeten dalam bidang masing-masing.

Sumber daya lain yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana yang penting dalam proses pendidikan. Depdiknas (2008) membedakan pengertian sarana dan

prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah perangkat atau peralatan yang digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah perangkat yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran, seperti ruang kelas.

Sarana prasarana SMP Negeri 1 Srandakan sudah sesuai dengan SPL, setiap kelas memiliki LCD proyektor, internet, ruang lab UNBK, lab bahasa walaupun karena biaya perawatan mahal sekarang tidak digunakan. Kelengkapan lain ada modul pendamping, keping VCD ujian CBT, buku LKS dll. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana cukup memadai walaupun ada kerusakan peralatan, akan tetapi sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 1 Srandakan mendukung kebijakan peningkatan mutu di sekolah, karena dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

c. Komunikasi Kepala Sekolah dengan Guru, Karyawan dan Siswa

Komunikasi yang terjalin baik antar warga sekolah akan berdampak pada peningkatan mutu suatu sekolah. Komunikasi menurut H.A.R. Tilaar & Rian Nugroho (2008: 222-223) merupakan sesuatu yang paling dasar dalam keberhasilan suatu implementasi, karena melalui komunikasi yang baik akan dapat mengkondisikan suasana proses implementasi yang baik sesuai dengan tujuan maupun manfaat yang telah ditetapkan. Selanjutnya Sudiyono (2007: 93-97) menambahkan bahwa keputusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal apabila telah memenuhi persyaratan implementasi, salah satunya perlu adanya koordinasi yang kuat antar agen pelaksana. Dalam strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu di sekolah, kepala sekolah menjadi sebagai penyalur komunikasi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya

Dalam strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu kepala sekolah SMP Negeri 1 Srandakan komunikasi secara umum dilaksanakan bisa melalui *briefing* atau rapat dengan guru dan karyawan, bisa khusus guru, atau khusus karyawan. Kelancaran komunikasi di SMP Negeri 1 Srandakan bisa dilihat dari bentuk komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru, dan karyawan yaitu dengan melibatkan semua guru dan karyawan

dalam pengambilan keputusan kebijakan peningkatan mutu.

d. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan ditetapkan pada awal tahun ajaran baru. Suatu kebijakan peningkatan mutu dibutuhkan kerjasama antar interorganisasi sekolah khusus kepala sekolah, guru, dan karyawan sehingga pelaksanaannya dan hasilnya akan baik sesuai dengan standard dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut ditetapkan dari hasil diskusi dan musyawarah antara kepala sekolah dan waka kurikulum. Kemudian hasil kebijakan yang telah dimusyawarahkan tersebut dirapatkan dan disosialisasikan bersama guru dan karyawan, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan kondisi siswa saat ini.

Bentuk dari pengukuhan kebijakan peningkatan mutu berupa SK tim pelaksana peningkatan mutu. Setelah dirumuskan bersama jika disetujui maka kebijakan tersebut akan disahkan dan ditetapkan sebagai kebijakan peningkatan mutu sekolah SMP Negeri 1 Srandakan, maka akan ada surat keputusan dari kepala sekolah yang akan ditindak lanjuti oleh tim peningkatan mutu.

e. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah kepala, guru, karyawan, dan komite sekolah merupakan agen pelaksana. Sebagai agen pelaksana kebijakan guru harus memiliki kompetensi guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Menurut teori Georg C. Edward (Subarsono: 2008: 89-104) apabila agen pelaksana memiliki watak karakteristik yang baik, maka mereka dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Guru sebagai agen pelaksana kebijakan juga harus mampu mendidik anak, mengajar, memberi motivasi untuk belajar, memberi contoh baik dalam sikap, prilaku, pakaian, kedisiplinan, mengetahui minat dan bakat siswa.

Kepala sekolah, guru, dan karyawan sudah berkompeten dalam bidang masing-masing, mereka berhasil melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kemampuannya sehingga tujuan kebijakan peningkatan mutu di sekolah dapat tercapai.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dalam penyelenggaraan kebijakan peningkatan mutu sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan sejauh mana dukungan komite sekolah dan lingkungan sekitar memberikan dukungan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sekolah mendapat dukungan dari orang tua siswa dan komite sekolah, dalam hal ini keadaan orang tua siswa sebagian besar terdiri dari masyarakat ekonomi lemah, dengan mata pencaharian yang beragam seperti nelayan, petani, penambang pasir dan batu, buruh dan lain sebagainya namun semangat untuk menyekolahkan putra-putrinya cukup tinggi.

Dapat dikatakan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan mutu sangat mendukung terlaksananya kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan. Sekolah juga mendapat dukungan oleh pemerintahan daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang sangat nyata. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sangat memprioritaskan kesejahteraan, prestasi guru, karyawan dan siswa dalam berbagai bentuk seperti uang kesejahteraan atau intensif untuk guru, karyawan maupun beasiswa untuk siswa.

2. Kendala-kendala yang Muncul dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu di SMP Negeri 1 Srandakan

a. Standard dan Tujuan

Strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 1 Srandakan terdapat kendala pada standar dan tujuan kebijakan yaitu, permasalahan pada guru dan siswa karena standarnya minimal pencapaian nilai rata-rata hasil ujian harus sama dengan tahun kemarin, maka guru ada yang optimis ada juga yang pesimis, kurang semangat. Guru terkendala kepentingan pribadi, selain itu karena siswa mempunyai latar belakang yang berbeda otomatis mempunyai kendala yang bervariasi.

b. Sumber Daya Sekolah

Kondisi sumber daya sekolah SMP Negeri 1 Srandakan sudah memenuhi standar operasional, untuk sarana-prasarana sudah terpenuhi, namun ada beberapa sarana-prasarana yang rusak sehingga tidak dapat

digunakan, pelayanan minimal sudah tercukupi. Kondisi guru dan karyawan sudah berkompoten dan mereka sangat mendukung kebijakan. Selain itu guru juga sudah memenuhi standar, hal tersebut dibuktikan dengan guru telah bersertifikasi sehingga guru dapat dikatakan berkompoten, namun masih ada sikap pesimisme dari guru dan ada perbedaan interpretasi antara guru satu dengan yang lain itu adalah hal yang biasa terjadi di sekolah. Dari sisi siswa, masih ada siswa malas dalam belajar, siswa tidak mempunyai cita-cita dimasa depan, siswa belum dewasa dalam artian mereka belum menyadari manfaat dari pendidikan.

Sarana ruang kelas maupun media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sudah memadai. Hanya saja pemanfaatan fasilitas masih kurang, dapat dilihat laboratorium bahasa inggris tidak digunakan lagi karena kerusakan yang disebabkan kesadaran siswa untuk merawat dan menjaga fasilitas di sekolah masih kurang selain itu karena faktor biaya perawatan yang mahal menjadikan halangan bagi pihak sekolah untuk memanfaatkannya sebagai sarana kegiatan belajar mengajar. Jika laboratorium bahasa dimanfaatkan secara maksimal maka kemampuan siswa belajar bahasa asing akan meningkat Komunikasi Kepala Sekolah dengan Guru, Karyawan dan Siswa

Komunikasi antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa pada strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 1 Srandakan tidak menemui kendala yang berarti, kendala memang ada tetapi tidak begitu berarti, setiap ada kebijakan pasti ada pro dan kontra itu merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Komunikasi kepala sekolah dengan guru, karyawan dan siswa selama ini lancar-lancar saja, karena setiap minggu pasti ada brifing atau rapat rutin walaupun tidak semua guru maupun karyawan yang dapat mengikuti, dan setiap awal tahun pasti diselenggarakan workshop bersama bapak dan ibu guru.

c. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Kendala interorganisasi dan aktivitas pengukuhan menjadi dalam strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 srandakan. Setiap terjadinya sebuah kebijakan atau perubahan pasti akan

terjadi pro dan kontra bagi individu guru. Ada beberapa guru yang kontra terhadap perubahan tersebut dikarenakan guru tidak paham dampak dari system peningkatan mutu, tetapi bagi guru yang paham terhadap dampak peningkatan mutu tersebut, mayoritas guru mendukung kebijakan atau perubahan itu terjadi. Hal itu terjadi karena setiap pengambilan keputusan terhadap setiap kebijakan selalu melibatkan guru dan karyawan di sekolah.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan memang menjadi kendala, meskipun prosentasinya sedikit sekali. Guru sebagai agen pelaksana mempunyai tugas pokok menerapkan kebijakan kepada siswa. Permasalahannya kembali pada kondisi personal guru, ada beberapa mempunyai perbedaan karakter itu bagi kami merupakan kendala, tetapi presentasinya sedikit sekali. Untuk guru dalam melaksanakan tugas sudah sangat baik, pada saat pelaksanaan ada guru yang tidak bisa mengajar atau berhalangan hadir karena berbenturan dengan kepentingan pribadi maupun sosial.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Disini permasalahan kondisi ekonomi, sosial orang tua, status orang tua yang mempunyai latar belakang yang bermacam-macam rata-rata, 50% masyarakat menengah kebawah, ada juga anak yang mempunyai latar belakang orang tua kurang baik sehingga anak menjadi kurang perhatian. Selain itu mengenai pembiayaan ada beberapa orang tua yang tidak bisa menyumbang dana. Selain itu ada juga pada saat rapat diawal tahun ajaran orang tua menyanggupi untuk menyumbang dana tetapi pada saat akhir tahun ajaran hal tersebut tidak terealisasikan. Hal itu terjadi dikarenakan kondisi ekonomi orang tua siswa tergolong dalam ekonomi rendah.

3. Solusi untuk Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu di SMP Negeri 1 Srandakan

a. Standard dan Tujuan

Solusi untuk yang dilakukan pada standar dan tujuan kebijakan peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 1 Srandakan. Dengan adanya jadwal yang sudah ditentukan diharapkan agar mampu menyatukan kekurangan yang ada pada guru maupun siswa, misalkan ada guru yang

ijin segera mungkin dicarikan penggantinya atau siswa diberi tugas lain, siswa yang membolos langsung diberi pembinaan. Dengan jadwal yang telah disusun nantinya guru, karyawan, siswa dan orang tua diharapkan secara cepat mampu bekerja sama mengatasi permasalahan yang ada supaya meningkatkan prestasi siswa maupun sekolah.

b. Sumber Daya Sekolah

Kondisi sumber daya sekolah pada strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 1 Srandakan sudah sesuai standar operasional, bisa dikatakan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu. Maka dari itu tugas sekolah tinggal menyatukan sikap optimis dan pesimisme supaya semua tetap optimis. Untuk siswa selalu diberi arahan supaya mengerti pentingnya pendidikan, semakin sering siswa diberi pengertian arahan siswa akan menjadi lebih dewasa pemikirannya dan siswa tersebut akan mempunyai perasaan bersalah. Karena kalau sudah ada keyakinan untuk berhasil maka dalam pelaksanaan kebijakan akan mendapatkan hasil yang positif.

c. Komunikasi Kepala Sekolah dengan Guru, Karyawan dan Siswa

Solusi mengenai kendala komunikasi kepala sekolah dengan guru, karyawan, dan siswa pada strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 1 Srandakan yaitu dengan mengadakan rapat minimal setiap satu minggu sekali, untuk siswa sendiri komunikasi dilakukan pada saat upacara bendera itu sifatnya dimana perlu saja. Selain itu kepala sekolah memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Hampir semua orang mempunyai alat komunikasi maka dari itu kita manfaatkan untuk menjalin komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan karyawan. Setiap ada rapat dan hasil rapat pasti selalu diinformasikan melalui WA atau E-mail. Jadi misalkan ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir tidak ketinggalan informasi dari sekolah. Secara keseluruhan komunikasi kepala sekolah dengan, guru, karyawan, dan siswa selama ini cukup lancar karena selalu ada rapat, selain itu terbantu juga dengan teknologi yang ada pada saat ini.

d. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Sebelum rapat pleno kami mengajak staff kepala sekolah (WaKaKur, WaKaSis, urusan kesiswaan, kurikulum, humas dan sarpras) untuk berpikir untuk merumuskan kebijakan yang akan kita laksanakan, jika ada kekurangan dan kelebihan bisa diolah pada saat itu juga. Jadi ide tidak hanya dari satu orang, tidak hanya dari saya saja maka kebijakan akan lebih bagus, jika dalam proses pembentukan kebijakan ada perbedaan interpretasi akan dimusyawarahkan bersama-sama diambil yang terbaik untuk meningkatkan mutu sekolah.

e. Karakteristik Agen Pelaksana

Strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu di sekolah SMP Negeri 1 Srandakan terdapat kendala. Maka dari agar kebijakan terlaksana dengan baik, solusi yang diambil dengan cara kepala sekolah melakukan pendekatan secara personal mengajak guru yang bersangkutan untuk bicara mengenai permasalahan yang sedang dialami di ruang kepala sekolah agar lebih terbuka. Dari situlah akan terlihat apakah ada masalah ekonomi, sosial di masyarakat. Karena jika ada guru yang mempunyai masalah pasti akan mempengaruhi kinerja guru dalam mengajar.

Secara keseluruhan guru mampu menjalankan tugas dengan baik, hanya saja jika ada guru yang tidak bisa mengajar harus dicarikan guru pengganti, bisa guru yang sesuai mata pelajaran guru yang berhalangan hadir, jika tidak ada yang sesuai maka dicarikan pengganti dari guru piket. Guru piket akan memberi tugas pengganti yang sebelumnya sudah berkordinasi dengan guru bersangkutan.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Solusinya dengan melakukan *home visit* oleh tim BK. Untuk permasalahan kendala pembiayaan dengan adanya program pemerintah PIP (Program Indonesia Pintar) yang mendukung pendidikan. Jadi jika sumber dana dari orang tua dirasa kurang bisa mengambil dari program pemerintah untuk mendukung kebijakan peningkatan mutu tetap bisa dilaksanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Strategi implementasi kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan dilihat dari beberapa aspek:
 - a. Pencapaian standar dan tujuan, yaitu (1) menetapkan nilai KKM, (2) siswa mengikuti kegiatan sesuai jadwal, (3)

ada perkembangan nilai pada TPM dan UN, dan tujuannya yaitu meningkatkan hasil ujian nasional, dan memperbaiki posisi peringkat sekolah.

- b. Sumber daya sekolah, yaitu (1) guru, karyawan ditempatkan sesuai latar belakang pendidikannya (2) memaksimalkan sarana fisik dan sarana pendukung pembelajaran seperti komputer, layar proyektor, keping VCD dalam proses pembelajaran.
 - c. Komunikasi kepala sekolah dengan guru, karyawan, dan siswa, yaitu Kelancaran komunikasi pada saat pengambilan keputusan dengan melibatkan semua guru dalam menentukan kebijakan.
 - d. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan di SMP Negeri 1 Srandakan dalam merancang kebijakan, yaitu mengajak stakeholder (wakil kepala sekolah berbagai bidang) dan seluruh guru untuk merancang kebijakan, setelah kebijakan ditetapkan kepala sekolah menerbitkan surat keputusan kepala sekolah (SK).
 - e. Karakteristik agen pelaksana di SMP Negeri 1 Srandakan, yaitu dilihat latar belakang pendidik dan tenaga kependidikan di SMP N 1 Srandakan diketahui bahwa rata-rata guru sudah S1 dan sudah berkompeten dalam bidangnya. Guru di sekolah ini ditempatkan sesuai latar belakang pendidikan, kompetensinya.
 - f. Kondisi sosial ekonomi, dan politik keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di sekolah terutama mengenai kebijakan pembiayaan dilihat terlebih dahulu kemampuan ekonomi serta kesanggupan pembiayaan dari orang tua siswa.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pada implementasi kebijakan mutu implementasi kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan dilihat dari:
 - a. Kendala pencapaian standar dan tujuan, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap pentingnya pendidikan,

- dan kedisiplinan siswa tergolong rendah.
- b. Sumber daya, yaitu (1) guru tidak dapat menghadiri pembelajaran di kelas, dan (2) sarana prasarana pembelajaran yang tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
 - c. Komunikasi kepala sekolah dengan guru, karyawan, dan siswa, yaitu adanya guru yang tidak dapat mengikuti rapat maupun briefing.
 - d. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, yaitu terjadinya pro dan kontra antara pengambil kebijakan.
 - e. Karakteristik agen pelaksana, yaitu masing-masing personal guru memiliki latar belakang, kebutuhan, dan prinsip yang berbeda.
 - f. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yaitu kebanyakan keadaan ekonomi orang tua siswa memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah.
3. Solusi untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Srandakan, dilihat dari:
- a. Pencapaian standar dan tujuan, yaitu memberi pendekatan agar siswa tersebut ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, serta melakukan *home visit* atau kunjungan dari panitia dan BK untuk siswa yang bersangkutan.
 - b. Sumber daya sekolah, yaitu (1) mencari guru pengganti yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau menjadikan guru piket sebagai guru pengganti; (2) pemakaian sarana prasarana secara bergantian, dan dilakukan perawatan secara berkala dengan memanfaatkan dana BOS.
 - c. Komunikasi kepala sekolah dengan guru, karyawan, dan siswa, yaitu menginformasikan hasil rapat maupun briefing melalui WA sehingga bagi guru atau karyawan yang berhalangan hadir masih bisa mengetahui keputusan rapat secara langsung.
 - d. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, yaitu dilakukan musyawarah bersama-sama sehingga diambil yang terbaik.
 - e. Karakteristik agen pelaksana, yaitu melakukan pendekatan personal khususnya kepada guru yang mempunyai kendala dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu.
 - f. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yaitu disediakan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal yang dianggap perlu mengenai strategi implementasi kebijakan peningkatan sekolah di SMP Negeri 1 Srandakan saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sekolah diharapkan lebih meningkatkan pengadaan fasilitas sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran.
2. Sekolah diharapkan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran seperti pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran yang up to date agar siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar.
3. Sekolah diharapkan lebih meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dengan mengikutsertakan guru dalam *workshop*/ pelatihan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, J. S. (2007). *Pendidikan Berbasis Mutu: prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Fattah, N. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam konteks penerapan MBS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Irene, S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, Y. B. (2011). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Miles, M.B. & Huberman, A. M. (2014). *Qualitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: CA: SAGE.
- Mutohar, P. M. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah: strategi peningkatan mutu dan daya saing lembaga pendidikan islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage Publications*.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan, D. (2002). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan, D. (2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah: dari unit birokrasi ke lembaga akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar.
- Sugiyono. (2010). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamroni. (2013). *Manajemen Pendidikan: suatu usaha meningkatkan mutu sekolah*. Yogyakarta: Ombak.
- Zazin, N. (2011). *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.